

**PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP *TAX AVOIDANCE***
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI tahun 2010-2013)

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

RANDI MEIZA
98686/2009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Wisuda Periode Maret 2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI 2010-2013)**

Oleh:

Randi Meiza

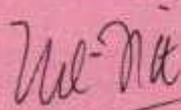
98686/2009

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode Maret 2015
dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 10 Februari 2015

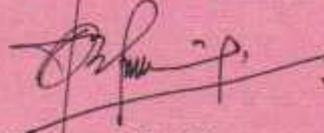
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Nelvirita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19740706 199903 2 002

Pembimbing II



Halmawati, SE, M.Si
NIP. 19740303 200812 02 001

PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *DEFERRED TAX EXPENSE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI tahun 2010-2013)

Randi Meiza

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : meiza101@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh *Good Corporate Governance* (1a) Kepemilikan Institutional (1b) Struktur Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* dan (2) *Deferred Tax Expense* (DTE) terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 sampai 2013. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 35 perusahaan sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id dan *website* perusahaan sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%, maka hasil penelitian menyimpulkan: (1a) Kepemilikan Institutional (X_{1a}) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance* (Y) dengan nilai signifikansi $0.16 > 0.05$ serta nilai negatif, (1b) Struktur Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance* (Y) dengan nilai signifikansi $0.7103 > 0.05$ serta nilai positif, (2) *Deferred Tax Expense* (X_2) berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance* (Y) dengan nilai signifikansi $0.0195 < 0,05$ serta nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak dan hipotesis kedua diterima.

Hasil penelitian diatas, disarankan: Menambahkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan, seperti: kualitas audit, *komite audit*, dan kompensasi manajemen, dan kompensasi rugi fiskal. Penelitian selanjutnya sebaiknya Untuk dapat memilih model *Tax Avoidance* terbaik selain di dalam penelitian.;

Kata Kunci : *Good corporate Governance*, Kepemilikan institutional, Struktur Dewan Komisaris Independen, *Deferred Tax Expense* dan *Tax Avoidance*

ABSTRACT

This study aimed to examine (1) the effect of *Good Corporate Governance* (1a) Institutional ownership (1b) Against *Tax Avoidance*, and (2) *Deferred Tax Expense* (DTE) to the *Tax Avoidance* in manufacturing firms listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX). This study classified the causative research. The population in this study are all companies listed on the Stock Exchange in 2010 until 2013, while the sample was determined by *purposive sampling* method in order to obtain a sample of 35 companies. The data used are secondary data obtained from the company's website www.idx.co.id and samples website. The analytical method used is multiple regression analysis.

Based on the results of multiple regression analysis with a significance level of 5%, then the results of the study concluded: (1a) institutional ownership (X_{1a}) no significant and negative effect on *Tax Avoidance* (Y) with a significance value of $0.16 > 0:05$ and values as negative, (1b) Structure of the Board of Independent Commissioners (X_{1b}) no significant and positive effect on the *Tax Avoidance* (Y) with a significance value of $0.7103 > 0:05$ and a values as positive, (2) *Deferred Tax Expense* (X_2) significant negative effect on *Tax Avoidance* (Y) with a significance value of $0.0195 > 0.05$ and values as negatif. This research Show that the first reject and the second hypothesis was accepted.

The above results, it is suggested: Add in go ther variables that could be expected to affect tax avoidance companies, such as: the quality of the audit, the audit committee, management dan kompensasi, and tax loss carry forwards. Future studies should be able to choose the best model of *Tax Avoidance* apart in the study.;

Keyword : *Good corporate Governance*, Institutional ownership, Structure of the Board of Independent Commissioners, *Deferred Tax Expense* and *Tax Avoidance*

1. PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara terbesar untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu pajak merupakan fenomena yang penting yang selalu mengalami perkembangan di Indonesia yang harus dikelola dengan baik.

Di Indonesia usaha-usaha untuk meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No.S-14/PJ.7/2003, 2003). Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax Avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini merupakan cara yang diperkenankan undang-undang namun strategi yang diterapkan perusahaan ini tetap saja dapat merugikan penerimaan negara (Sopnar, 1996).

Aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana dan Moser, 2009). *Taxavoidance* merupakan suatu strategi pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam menurunkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Menurut Rohatgi dalam Bambang: 2009, di banyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable*).

Penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal dan dapat juga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai usaha yang baik.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), pengukuran adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat menggunakan banyak proksi yang bervariasi. Salah satu pengukuran untuk membuktikan apakah ada *tax avoidance* dalam Hanlon dan Heitzman (2010) adalah *discretionary measures of tax avoidance*. Pengukuran tersebut merujuk pada Desai dan Dharmapala (2006), yang menghitung pengukuran abnormal *book-tax differences* dengan melakukan regresi total *book-tax differences* terhadap total akrual, dimana total akrual merupakan kontrol atas manajemen laba. Residual dari hasil regresi tersebut yang digunakan sebagai proksi untuk mengukur penghindaran pajak. Pada penelitian ini peneliti memakai tarif pajak efektif atau lebih dikenal dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Hanlon dan Hietzman (2010) dalam Theresa (2012) melaporkan bukti yang mendukung bahwa adanya kegiatan operasi internasional akan membuat kesempatan penghindaran pajak lebih rendah dan berakibat tarif pajak efektif yang rendah.

Terdapat dua versi laporan keuangan yang dihitung oleh perusahaan setiap tahunnya, yaitu laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum dan laporan keuangan yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mills (dalam Ettredge et al., 2008) menyatakan bahwa beda antara laba menurut akuntansi (*book income*) dan laba/penghasilan menurut pajak (*taxable income*) dapat menunjukkan beda yang besar. Hal ini dikarenakan prinsip akuntansi yang berterima umum

menyediakan manajer keleluasaan dalam pemilihan estimasi dan metode akuntansi dibandingkan dengan ketentuan perpajakan yang hanya memberikan lebih sedikit keleluasaan.

Menurut Hotman T Pohan (2009) dalam penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan publik adalah kepemilikan institusi, *rasio tobin q*, akrual pilihan, tarif efektif pajak, dan biaya pajak ditunda terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik. Hasil Uji hipotesis untuk pengaruh secara parsial masing-masing variabel independen yaitu kepemilikan institusi tidak berpengaruh secara signifikan. Biaya Pajak yang ditunda juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, *Rasio Tobin*, perata laba, akrual pilihan, tarif efektif, berpengaruh secara nyata terhadap penghindaran pajak. Hasil Uji secara simultan terhadap faktor-faktor Menghasilkan model, dimana seluruh variabel berpengaruh secara signifikan.

Penelitian ini hanya membatasi pada pengaruh karakteristik *good corporate governance* dan *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance*. Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan Mayer, 2006). Efek perubahan perubahan temporer yang terefleksi pada kenaikan atau penurunan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diperlakukan sebagai beban pajak tangguhan (*deferred tax expenses*) atau penghasilan pajak tangguhan (*deferred tax income*) dan dilaporkan dalam laporan laba-rugi tahun berjalan bersama-sama beban pajak kini (*current tax expenses*), dengan penyajian secara terpisah, dengan demikian

perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak dimasa depan akan diakui sebagai utang pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui adanya biaya pajak tangguhan (*deferred tax expense*), yang berarti bahwa kenaikan utang pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk pelaporan keuangan dibanding laporan pajak

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam raktek *corporate governance*.

Corporate Governance menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-buruknya tatakelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. Pada penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen. Serta besarnya pajak tangguhan perusahaan akan adanya motivasi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Haruna dan Moser (2009) dalam Kurniasih (2013) menyatakan bahwa *corporate governance* yang dilihat struktur kepemilikannya memberikan dampak pada perusahaan dalam mengelola urusan pajak mereka. Jadi disini dapat dilihat struktur kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi bagaimana struktur

kepemilikannya memberikan dampak pada perusahaan dalam mengelola urusan pajak mereka. Jadi disini dapat dilihat struktur kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan melakukan keputusan tentang perpajakan di perusahaan mereka. Menurut Nurindah (2013) Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Jadi semakin tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme corporate governance akan semakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Keberadaan komite audit dan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Mayangsari: 2003). Dengan meningkatnya integritas laporan keuangan maka akan meningkatkan laba yang diharapkan perusahaan sehingga dewan komisaris pun berusaha menekan biaya-biaya yang ada terutama pajak, ini yang membuat bisa terjadinya perlakuan penghindaran pajak. Salah satu karakteristik *corporate governance* yaitu proporsi dewan komisaris yang tinggi maka akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh karena itu semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka semakin menurun praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan PSAK no. 46 alokasi pajak antar periode diawali dengan adanya keharusan bagi perusahaan untuk mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang harus di laporkan di neraca. Pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tersebut merupakan pengakuan tentang konsekuensi pajak

dimasa mendatang atas efek kumulatif perbedaan temporer pengakuan penghasilan dan beban untuk tujuan akuntansi dan tujuan fiskal. Dalam pendekatan aktiva-kewajiban, yang dimaksud dengan perbedaan temporer adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban dengan nilai tercatat aktiva atau kewajiban tersebut. Efek perubahan perubahan temporer yang terefleksi pada kenaikan atau penurunan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diperlakukan sebagai beban pajak tangguhan (*deferred tax expenses*) atau penghasilan pajak tangguhan (*deferred tax income*) dan dilaporkan dalam laporan laba-rugi tahun berjalan bersama-sama beban pajak kini (*current tax expenses*), dengan penyajian secara terpisah.

Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (wajib pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak. Yang dibutuhkan oleh negara adalah ketaatan. Suka tidak suka, rela tidak rela, yang penting bagi negara adalah perusahaan tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat pajak adalah beban (yang akan mengurangi laba bersih perusahaan) maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun demikian penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar tidak merugikan perusahaan di kemudian hari. Plesko (2002) dalam Phillipset al. (2003) mengungkapkan bahwasemakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan. Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi pelaporan pajak tangguhan atau beban

pajak ditunda (*deferred tax expenses*) perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, semakin tinggi alokasi antar periode berarti semakin kecil praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Di Indonesia sendiri pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan penanaman modal asing melaporkan rugi pada laporan keuangannya dan tidak membayar pajak dalam waktu 5 tahun berturut-turut, antara lain ditengarai karena praktik penghindaran pajak (Jakarta Kompas: 2005). Negara Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance/unacceptable tax avoidance*) yakni dengan membayar pajak rata-rata 20% padahal pajak yang harusnya dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenng dalam Budiman: 2012).

Penelitian yang dilakukan Nuralifmida Ayu Annisa (2011) pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance (studi pada perusahaan terdaftar di bej tahun 2008), yang membahas karakteristik *good corporate governance* (kepemilikan institusional, komposisi dewan, komisaris independen, dewan komisaris, komite audit, kualitas audit), Hanya komite audit dan kualitas audit yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* sedangkan kepemilikan institusional, komposisi dewan, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Dalam penelitian yang dilakukan Nuraflihmida (2011) mengemukakan bahwa pengaruh presentasi dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan adalah salah satu dari bentuk mekanisme peningkatan *corporate governance*. Apabila presentase dewan komisaris independen di atas 30 % maka ini adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol

dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun periode laporan keuangan dari tahun 2010 – 2013 pada perusahaan yang list di bej indonesia. Penelitian ini fokus pada tiga variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan beban pajak ditunda (*deffered tax expense*).

Berdasarkan latar belakang di atas dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* dan *Deferred Tax Expense* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang list di BEI tahun 2010-2013”.

2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. *Tax Avoidance*

Menurut Mardiasmo (2003), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang yang ada. Senada dengan Mardiasmo (2003), Menurut Heru (1997) penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidaklegal (*Unlawful*) (Xynas, 2011).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan

yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 2012). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*.

B. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005).

Kepemilikan institusional akan dilambangkan dengan INST. Menurut Khurana (2009), kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

C. Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubunganafiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008). Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian keberadaan komite audit dan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Mayangsari, 2003).

D. *Deferred Tax Expense*

Deferral Method (Metode Pajak Tangguhan) Dalam metode ini menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiscal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil perhitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai Pajak Tangguhan pada laporan laba rugi.

E. Evaluasi Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *tax avoidance* terus berkembang saat ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan indikator dan hasil beragam yang menjelaskan mengenai *tax avoidance* perusahaan. Beberapa diantaranya adalah:

1. Nuralifmida Ayu Annisa (2011) pengaruh corporate governance terhadap *tax avoidance* (studi pada perusahaan terdaftar di BEI tahun 2008), yang membahas karakteristik *good corporate governance* (kepemilikan institusional, komposisi dewan, komisaris independen, dewan komisaris, komite audit, kualitas audit), Hanya komite audit dan kualitas audit yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* sedangkan kepemilikan institusional, komposisi dewan, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
2. Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari (2012) yang melakukan penelitian pengaruh *return on assets*, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada *tax avoidance* dapat disimpulkan bahwa *Return on Assets* (ROA), Ukuran perusahaan dan Kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*, sedangkan *Leverage* dan *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.
3. Hotman T Pohan (2009) dalam penelitian analisis pengaruh kepemilikan institusi, rasio tobin q, akrual pilihan, tarif efektif pajak, dan biaya pajak ditunda terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik. Hasil Uji

hipotesis untuk pengaruh secara parsial masing-masing variabel independen yaitu kepemilikan institusi tidak berpengaruh secara signifikan. Biaya Pajak yang ditunda juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, Rasio Tobin, perata laba, akrual pilihan, tarif efektif, berpengaruh secara nyata terhadap penghindaran pajak. Hasil Uji secara simultan terhadap faktor-faktor Menghasilkan model, dimana seluruh variabel berpengaruh secara signifikan yaitu $0,013 < 0,05$.

F. Pengembangan Hipotesis

a) Hubungan kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko, 2007). Dengan besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* (Darmawati, 2006). Pemegang saham tersebut akan memiliki insentif dalam meningkatkan kualitas *good corporate governance* perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Harunadan Moser (2009) dalam Kurniasih (2013) menyatakan bahwa struktur *corporate governance* yang dilihat struktur kepemilikannya memberikan dampak pada perusahaan dalam mengelola urusan pajak mereka. Jadi disini dapat dilihat struktur kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan melakukan keputusan tentang perpajakan di perusahaan mereka. Menurut Nurindah (2013) Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Jadi semakin

tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme *corporate governance* akan semakin baik sehingga system penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sehingga dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_{1a}: Kepemilikan Institusional berpengaruh Positif terhadap *tax avoidance*.

b) Hubungan Komposisi Komisaris Independen dengan *tax avoidance*

Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif (Boediono, 2005). Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian keberadaan komite audit dan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Mayangsari, 2003). Dengan meningkatnya integritas laporan keuangan maka akan meningkatkan laba yang diharapkan perusahaan sehingga dewan komisaris pun berusaha menekan biaya-biaya yang ada terutama pajak, ini yang membuat bisa terjadinya perlakuan penghindaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan Nuraflimida (2011) mengemukakan bahwa pengaruh presentasi dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan adalah salah satu dari bentuk mekanisme peningkatan *corporate governance*. Apabila presentase dewan komisaris independen diatas 30% makaini adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk

melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun.

Dapat disimpulkan dengan salah satu karakteristik *corporate governance* yaitu proporsi dewan komisaris yang baik maka akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh karena itu semakin baik proporsi dewan komisaris independen maka semakin menurun praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{1b} : Komposisi Komisaris Independen berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

c) Hubungan *Deferred Tax Expense* dengan *tax avoidance*

Berdasarkan PSAK no. 46 alokasi pajak antar periode diawali dengan adanya keharusan bagi perusahaan untuk mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang harus di laporkan di neraca. Pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tersebut merupakan pengakuan tentang konsekuensi pajak dimasa mendatang atas efek kumulatif perbedaan temporer pengakuan penghasilan dan beban untuk tujuan akuntansi dan tujuan fiskal. Dalam pendekatan aktiva-kewajiban, yang dimaksud dengan perbedaan temporer adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban dengan nilai tercatat aktiva atau kewajiban tersebut. Efek perubahan perubahan temporer yang terefleksi pada kenaikan atau penurunan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diperlakukan sebagai beban pajak tangguhan (*deferred tax expenses*) atau penghasilan pajak tangguhan (*deferred tax income*) dan dilaporkan dalam laporan laba-rugi tahun berjalan bersama-sama

beban pajak kini (*current tax expenses*), dengan penyajian secara terpisah.

Dengan demikian, berdasarkan PSAK no.46 PPh yang dilaporkan dalam laporan laba-rugi akan menunjukkan (1) beban pajak kini ditambah beban pajak tangguhan, atau (2) beban pajak kini dikurangi penghasilan pajak tangguhan. Jumlah agregat beban pajak kini dan pajak tangguhan dapat berupa (a) beban pajak (*tax expenses*) atau (b) penghasilan pajak (*tax income*).

Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (wajib pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak. Karena pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan, maka negara juga tidak membutuhkan 'kerelaan wajib pajak'. Yang dibutuhkan oleh negara adalah ketaatan. Suka tidak suka, rela tidak rela, yang penting bagi negara adalah perusahaan tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lain halnya dengan sumbangan, infak maupun zakat, kesadaran dan kerelaan pembayar diperlukan dalam hal ini.

Mengingat pajak adalah beban (yang akan mengurangi laba bersih perusahaan) maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun demikian penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar tidak merugikan perusahaan di kemudian hari.

Plesko (2002) dalam Phillipset al. (2003) mengungkapkan bahwasemakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan.

Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi pelaporan pajak tangguhan atau beban pajak ditunda perusahaan yang diukur

dengan alokasi pajak antar periode akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, semakin tinggi alokasi antar periode berarti semakin kecil praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: *Deferred tax expense* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

G. Kerangka Konseptual

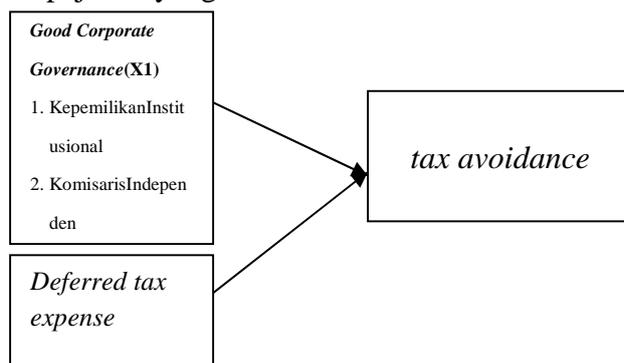
Banyaknya perusahaan besar di Indonesia yang beroperasi membuat pendapatan negara yang besar dari pembayaran pajak harus lebih dioptimalkan. Melakukan penagihan terhadap pajak tidak semudah yang dibayangkan, mulai dari perubahan sistem sampai perubahan tarif yang dilakukan pemerintah untuk pemungutan pajak tapi masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya kepada negara. Dengan peraturan yang dibuat sebaik mungkin membuat pihak perusahaan selalu mencari celah untuk melakukan *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional yang proporsi kepemilikan saham dengan jumlah besar akan mempengaruhi arah jalan perusahaan secara strategis. Pihak yang mendirikan perusahaan ini harus memikirkan bagaimana kelangsungan kedepannya dari usahanya dengan kata lain pendiri ini bersikap tidak saja mencari laba besar atau deviden yang tinggi berbeda dengan saham yang diperjual belikan di publik. Perusahaan harus diatur agar tindakan yang diambil tidak akan merugikan di masa datang termasuk kebijakan dalam melakukan *Tax avoidance*. Walaupun hal ini diperbolehkan namun jika penghindaran yang dilakukan diketahui akan membuat perusahaan terkena sanksi nantinya.

Dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan diharapkan dapat menjaga kepentingan para pihak yang lemah dalam perusahaan yaitu pemilik saham yang memiliki jumlah sedikit. Pengetahuan komisaris independen

mengenai peraturan yang berlaku serta tidak adanya kepentingan untuk memihak dan tidak dapat di pengaruhi akan membuat perusahaan beroperasi tanpa melanggar Undang Undang dan peraturan yang berlaku. Komisaris independen mampu mengendalikan agar *tax avoidance* yang dilakukan masih dilakukan dalam keadaan yang benar.

Dengan adanya kewajiban membayar pajak yang lebih besar oleh perusahaan di masa akan datang, pihak manajemen akan melakukan usaha agar hal tersebut tidak terjadi. Ini memungkinkan pihak perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak agar tidak terlalu terbebani di masa yang akan datang. Penghindaran yang dilakukan memungkinkan diluar yang di perbolehkan dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.



H. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

H_{1a}: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H_{1b}: Komposisi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H₂: *Deferred Tax Expense* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

3. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kausatif. Menurut Fredy (1997), penelitian kausatif adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan atau keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain

B. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan manufaktur terdaftar di BEI dari tahun 2010 sampai tahun 2013.

C. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi merupakan keseluruhan elemen yang memenuhi syarat-syarat tertentu, berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan dijadikan objek dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dari tahun 2010 hingga 2013. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 137 perusahaan.

2) Sampel

Sampel merupakan bagian atau unit dari populasi. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel sesuai dengan kriteria tertentu. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (*purposive sampling*), yaitu:

1. Terdaftar sebagai perusahaan manufaktur di BEI.
2. Perusahaan yang secara terus menerus melaporkan laporan keuangannya dari tahun 2010 sampai 2013.
3. Perusahaan manufaktur yang laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian selama tahun 2010-2013.
4. Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan dalam mata uang selain kurs rupiah.
5. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan tidak mengalami delisting selama periode pengamatan.

Berdasarkan pada **Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel (lampiran)**, maka

perusahaan yang memenuhi kriteria dan dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 63 perusahaan dari 137 populasi selama 4 tahun sehingga menghasilkan 252 observasi yang ditunjukkan dalam **Tabel 2. Daftar Perusahaan Sampel (lampiran).**

D. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder data yang diperoleh dari perusahaan yang tergolong perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2010-2012. Menurut Mudrajad (2003) data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Variabel yang diteliti tersedia dengan lengkap dalam pelaporan keuangan tahun 2010-2013. Sumber data diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* dan website IDX: <http://www.idx.co.id>.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi dokumentasi dengan melihat laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

F. Variabel Penelitian

a) Variabel Dependen (Y)

Menurut Kuncoro (2003) variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel terikat model satu dalam penelitian ini adalah *Tax avoidance*.

b) Variabel Independen (X)

Menurut Kuncoro (2003:42) variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi

perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai pengaruh positif atau negatif bagi variabel terikat lainnya. Variabel bebas dari model satu ini adalah Kepemilikan Instiusional (INST), Struktur komisaris Independen (INDP) dan *Deferred Tax Expense* (DTE).

G. Pengukuran Variabel

a) Tax Avoidance (Y)

Tax Avoidance diukur dengan menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) :

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{pre - tax income}}$$

Keterangan:

CETR : *Cash Effective Tax Rate*.

Cash Tax Paid : Pajak yang dibayarkan perusahaan

Pre - tax income : Laba sebelum pajak

b) Kepemilikan Instiusional (X₁)

Kepemilikan instiusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Instiusional} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki pihak institusi}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

c) Struktur Komisaris Independen (X₂)

Proporsi Dewan Komisaris Independen diukur dengan rasio sebagai berikut :

| |
|---|
| $\text{Struktur :} = \frac{\text{Proporsi Komisaris Independen}}{\text{jumlah komisaris independen}}$ |
|---|

d) Deferred tax expense (X₃)

Deferred tax expense diukur:

$$DTE = (DTE_p - DTE_{p-1}) / TAP_{p-1}$$

di mana:

DTE_i= beban pajak tangguhan pada laporan keuangan yang berakhir pada tahun p.

DTE_{p-1}= beban pajak tangguhan pada laporan keuangan yang berakhir pada tahun p-1.

TAP-1= total aktiva pada awal tahun p.

H. Teknik Analisis Data

1) Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan apa yang ditemukan pada

hasil penelitian dan memberikan informasi sesuai dengan yang diperoleh dilapangan. Teknik deskriptif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel penelitian.

2) Analisis Induktif

a) Model Regresi Data Panel

Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Menurut Agus Widarjono (2007:250) ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel merupakan gabungan data data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variable*).

Model regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$CETR = \alpha + \beta_1 INST + \beta_2 INDP + \beta_3 DTE$$

CETR = *Cash Effective Tax Rate*.

INST = Kepemilikan institusional.

INDP = Persentase dewan komisaris independen.

TREF = Reformasi Perpajakan.

DTE = *Deferred Tax Expense*

= Konstanta Persamaan Regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

α = Standar error

b) Metode Estimasi Regresi Panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

1) *Common Effect Model* (CEM)

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun

individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

2) *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effects* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

3) *Random Effect Model* (REM)

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

c) Pemilihan Model

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni:

1) *Chow test* atau *Likelihood test*

Uji ini digunakan untuk pemilihan antara model *fixed effect* dan *common effect*. Dasar penolakan H_0 adalah dengan menggunakan pertimbangan Statistik *Chi-Square*, jika probabilitas dari hasil uji Chow-test lebih besar dari nilai kritisnya maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model* atau pooled OLS

H_a : *Fixed Effect Model*

2) *Hausman test*

Hausman test atau uji hausmann adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan. Setelah selesai melakukan uji Chow dan didapatkan model yang tepat adalah *fixed effect*, maka selanjutnya kita akan menguji model manakah antara model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat, pengujian ini disebut sebagai uji Hausman.

Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan. Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi *statistic Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H_0 ditolak dan model yang tepat adalah model *fixed effect* sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *random effect*.

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Jika model *common effect* atau *fixed effect* yang digunakan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi klasik. Namun apabila model yang digunakan jatuh pada *random effect*, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini disebabkan oleh variabel gangguan dalam model *random effect* tidak berkorelasi dari perusahaan berbeda maupun perusahaan yang sama dalam periode yang berbeda, varian variabel gangguan homoskedastisitas serta nilai harapan variabel gangguan nol.

d) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi pada data sudah mengikuti atau mendekati distribusi yang normal. Pada pengujian sebuah hipotesis, maka data harus terdistribusi

normal. Dalam Wing (2009: 5.37) terdapat dua cara untuk menguji normalitas dalam *software* Eviews, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-Bera.

Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan *skewness* dan *kurtosis* data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Jarque-Bera} = \frac{N-k}{6} \left[S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right]$$

(Wing, 2009: 5.37)

S adalah *skewness*, K adalah *kurtosis*, dan k menggambarkan banyaknya koefisien yang digunakan di dalam persamaan.

Terdapat dua cara untuk melihat apakah data terdistribusi normal. Pertama, jika nilai Jarque-Bera < 2 , maka data sudah terdistribusi normal. Kedua, jika probabilitas $>$ nilai signifikansi 5%, maka data sudah terdistribusi normal.

b) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ pada data yang tersusun dalam rangkaian waktu (*time series*). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2012). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, dilakukan dengan uji Durbin Watson. Pengambilan keputusan mengenai ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai D-W terletak antara angka -2 sampai +2, maka koefisien pada regresi tidak terdapat autokorelasi.
2. Bila D-W lebih rendah atau di bawah angka -2, maka koefisien pada regresi mengalami autokorelasi positif.
3. Bila nilai D-W lebih besar atau di atas angka +2, maka koefisien pada

regresi mengalami autokorelasi negatif.

c) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas ini digunakan suatu metode yang di sebut Uji White. Menurut Wing (2009: 5.12), uji White menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen, dan variabel independennya terdiri atas variabel independen, kemudian variabel tersebut diregresikan. Kriteria untuk pengujian White adalah:

- a. Jika nilai sig < 0,05 varian terdapat heterokedastisitas.
- b. Jika nilai sig > 0,05 varian tidak terdapat heterokedastisitas.

d) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Penggunaan korelasi bivariat dapat dilakukan untuk melakukan deteksi terhadap multikolonieritas antar variabel bebas dengan standar toleransi 0,8. Jika korelasi menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,8 maka dianggap variabel-variabel tersebut tidak memiliki masalah kolinearitas yang tidak berarti.

e) Uji Model

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi dimana untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen maka dapat dilihat dari nilai *adjusted R²*.

b) Uji F (*simultan*)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan signifikan atau tidak, sehingga dapat dipastikan apakah model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka model regresi linear berganda dapat dilanjutkan atau diterima. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05.

c) Uji t-Test (Hipotesis)

Uji t (*t-test*) dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik. Uji ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, (1) Jika t hitung > t tabel, maka H_0 ditolak dengan kata lain hipotesis diterima dan (2) Jika t hitung < t tabel, maka H_0 diterima dengan kata lain hipotesis ditolak.

6) Defenisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan defenisi operasional variabel sebagai berikut:

1. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal.

2. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

3. *Deferred Tax Expense*

Deferred Tax Expense adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).

4. HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Statistik Model

Untuk lebih mempermudah dalam melihat gambaran mengenai variabel yang diteliti, variabel tersebut dapat dijelaskan secara statistik seperti yang tergambar pada **Tabel 3. Statistik Deskriptif Model (lampiran)**.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 63 perusahaan dari tahun 2010-2013. Variabel *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,235858 dengan standar deviasi 0,320602 *tax avoidance* yang paling tinggi (maksimum) yaitu sebesar 1,456803 dan yang paling rendah (minimum) yaitu sebesar -4,330460. Variabel kepemilikan institusional rata-ratanya adalah sebesar 0,721190 dengan standar deviasi 0,7277. Kebijakan hutang yang paling tinggi (maksimum) yaitu sebesar 1,000000 dan yang paling rendah (minimum) yaitu sebesar 0,204000. Variabel komisaris independen rata-ratanya adalah sebesar 0,396834 dengan standar deviasi 0,151583 dan *tax avoidance* yang paling tinggi (maksimum) yaitu sebesar 1,000000 dan yang paling rendah

(minimum) yaitu sebesar 0,000000. sedangkan variabel *deferred tax expense* rata-ratanya adalah sebesar -0,000168 dengan standar deviasi 0,009834 dan *tax avoidance* yang paling tinggi (maksimum) yaitu sebesar 0,051406 dan yang paling rendah (minimum) yaitu sebesar -0,093150.

B. Model Regresi Data Panel

1) Regresi Panel Model

Berdasarkan hasil yang terdapat pada **Tabel 5. Hasil Uji Regresi Data Panel (lampiran)**, maka dapat dirumuskan persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 0,325886 - 0,150786 \text{ INST} + 0,049194 \text{ INDP} - 4,794952 \text{ DTE} + e$$

Hasil yang diperoleh dari pengujian diatas, adalah sebagai berikut:

a) Konstanta ()

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,325886. Hal ini berarti apabila tidak ada variabel-variabel independen (inst, indp dan dte) atau bernilai 0, maka CETR adalah sebesar 0,172897.

b) Koefisien Regresi () kepemilikan institusional

Nilai koefisien regresi variable kepemilikan institusional (INST) sebesar -0,150786. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kepemilikan Institusional akan mengakibatkan penurunan *tax avoidance* (CETR) sebesar 0,150786 dengan asumsi variabel lain tetap.

c) Koefisien Regresi () Komisaris Independen

Nilai koefisien regresi variable komisaris independen (INDP) sebesar 0,049194. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan komisaris independen akan mengakibatkan peningkatan *tax avoidance* (CETR) sebesar 0,049194, dengan asumsi variabel lain tetap.

d) Koefisien Regresi () *Defered Tax Expense*

Nilai koefisien regresi variabel *deferred tax expense* (DTE) sebesar -4,794952. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan *deferred tax expense* (DTE) akan diikuti oleh penurunan CETR sebesar 4,794952 dengan asumsi variabel lain tetap.

C. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan penjelasan model regresi data panel, model ini menggunakan *common effect model*.

1) Uji Normalitas

Terdapat dua cara untuk melihat apakah data terdistribusi normal. Pertama, jika nilai Jarque-Bera < 2 , maka data sudah terdistribusi normal. Kedua, jika probabilitas $>$ nilai signifikansi 5%, maka data sudah terdistribusi normal. Secara rinci hasil pengujian normalitas dapat terlihat **Tabel 8. Hasil Uji Normalitas (lampiran)**.

Dari Tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa bahwa residual data belum terdistribusi dengan normal dimana nilai Jarque-Bera model CEM (266907,5) $>$ 81,38, sedangkan nilai probabilitas model CEM yaitu $0.0000 < 0.05$ sehingga dianggap belum layak untuk dilakukan uji regresi berganda. Gujarati (2007) menyatakan bahwa asumsi normalitas mungkin tidak terlalu penting dalam set data yang besar, yaitu jumlah data lebih dari 30. Dalam penelitian ini jumlah observasi 252, dimana 63 perusahaan dikali 4 tahun. Jadi, sesuai dengan pernyataan Gujarati (2007) maka penelitian ini berada diatas set data yang besar karena besar dari 30 data, sehingga asumsi normalitas dalam penelitian ini tidaklah terlalu dipermasalahkan.

2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ pada data yang tersusun dalam

rangkaian waktu (*time series*). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin-Watson. Apabila nilai Durbin-Watson yang dihasilkan berada dalam rentang 1.55 – 2.46, maka dapat dinyatakan bahwa model yang digunakan terbebas dari gangguan autokorelasi. Pada tabel 7, terlihat nilai Durbin-Watson sebesar **2.315232**, maka dapat dinyatakan bahwa model yang digunakan terbebas dari gangguan autokorelasi karena berada diantara nilai 1.55-2.46.

3) Uji Heterokedastisitas

Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas ini digunakan suatu metode yang di sebut Uji White. Menurut Wing (2009: 5.12), uji White menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen, dan variabel independennya terdiri atas variabel independen, kemudian variabel tersebut diregresikan. Kriteria untuk pengujian White adalah:

- Jika nilai sig $<$ 0,05 varian terdapat heterokedastisitas.
- Jika nilai sig $>$ 0,05 varian tidak terdapat heterokedastisitas.

Hasil dari pengujian heterokedastisitas dapat dilihat dari **Tabel 9. Hasil Uji Heterokedastisitas (lampiran)** dapat dilihat nilai sig 0.0702 untuk variabel INST, 0.3460 untuk variabel indikator INDP, 0.1316 untuk variabel indikator DTE. Maka disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada penelitian ini.

4) Uji Multikolonieritas

Penggunaan korelasi bivariat dapat dilakukan untuk melakukan deteksi terhadap multikolonieritas antar variabel bebas dengan standar toleransi 0,8. Jika korelasi menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,8 maka dianggap variabel-variabel tersebut tidak memiliki masalah kolinearitas yang tidak berarti.

Hasil dari pengujian heterokedastisitas dapat dilihat dari **Tabel 10. Hasil Uji Multikolonieritas (lampiran)**, terlihat

bahwa model ini tidak mengalami multikolinieritas.

D. Uji Model

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil estimasi pada Tabel 5, diketahui bahwa nilai $AdjustedR^2$ yang diperoleh sebesar 0.018391. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 1.84%. dan sebesar 98.16% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam pada penelitian ini.

E. Uji F (Simultan)

Hasil pengolahan data pada tabel 5, menunjukkan F_{hitung} yaitu sebesar $2.667510 > F_{tabel} 2,641$ dan nilai signifikan pada $0.045030 < 0.05$. Hal ini berarti menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah *fix*.

F. Uji T (hipotesis)

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada 5, maka dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional (INST) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* (Y). Dari tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa nilai bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien bernilai negatif sebesar 0.150786, nilai t-statistik sebesar -1.409254, dan nilai probabilitas $0.16 > 0.05$ Artinya Kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Dengan demikian **hipotesis pertama (H_1) ditolak**
2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Pengaruh komisaris independen (INDP) signifikan negatif terhadap *tax avoidance* (Y). Dari tabel 9 di atas

dapat dilihat bahwa Komisaris Independen memiliki nilai koefisien bernilai positif sebesar 0.049194, nilai t-statistik sebesar 0.371911, dan nilai probabilitas $0.7103 > 0.05$. Artinya komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Dengan demikian **hipotesis kedua (H_2) ditolak**.

3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah *deferred tax expense* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Dari tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa memiliki nilai koefisien bernilai negatif sebesar 4.794952, nilai t-statistik sebesar 2.351799, dan nilai probabilitas $0.0195 < 0.05$. Artinya *deferred tax expense* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Dengan demikian **hipotesis ketiga (H_3) diterima**.

G. Pembahasan

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi tanggung jawab yang dijalankan kepemilikan institusional perusahaan kepada pemegang saham, pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Agresifitas pajak mengarah pada penghematan pajak, itu juga menyebabkan sebuah perusahaan potensial dikenakan sanksi oleh IRS terkait biaya pelaksanaan dan biaya agency (Chen, 2008).

Hal yang sama juga diungkapkan Haruna dan Moser (2009) dalam Kurniasih (2013) menyatakan bahwa struktur *corporate governance* yang dilihat struktur kepemilikannya memberikan dampak pada perusahaan dalam mengelola urusan pajak mereka. Jadi disini dapat dilihat struktur kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan melakukan keputusan tentang perpajakan di perusahaan mereka. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan *tax avoidance*. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005).

Selain itu hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hotman (2009) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan penelitian Nuralifmida(2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tax avoidance.

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan fungsi yang dilaksanakankomisaris independen untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian keberadaan komite audit dan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Mayangsari, 2003).

Dalam penelitian yang dilakukan Nuraflimida (2011) mengemukakan bahwa pengaruh presentasi dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan adalah salah satu dari bentuk mekanisme peningkatan *corporate governance*. Apabila presentase dewan komisaris independen diatas 30 % maka ini adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun.

Selain itu hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2012) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan penelitian Nuralifmida Ayu Annisa (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance.

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis kedua (H_3) diterima dan dapat disimpulkan bahwa *deferred tax expense* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan Suandy (2008 : 91) mengungkapkan bahwa apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban. Sebagai contoh apabila beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan aktiva (*aset*) tetap, maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. beban pajak ditunda perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode akan

mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, semakin tinggi alokasi antar periode berarti semakin kecil praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Plesko (2002) dalam Phillips (2003) mengungkapkan bahwa semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tanggungan dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik *tax avoidance* pada perusahaan. Selain itu hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hotman (2009) yang menyatakan bahwa *deferred tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

a) Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh karakteristik *good corporate governance* dan *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013. *tax avoidance* dilihat dari alat ukur manajemen *cash effective tax rate*. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.
2. komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.
3. *defereed tax expense* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.

b) Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu direvisi bagi peneliti selanjutnya antara lain:

1. Masih adanya sejumlah variabel lain yang belum digunakan dan memiliki kontribusi yang besar dalam mempengaruhi *tax avoidance* yang terjadi didalam sebuah perusahaan.
2. Dalam penelitian ini hanya dilakukan selama 4 tahun, maka untuk melihat tingkat erornya masih rendah,

c) Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan diatas, maka dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Menambahkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan, seperti: kualitas audit, *komite audit*, dan kompensasi manajemen, dan kompensasi rugi fiskal.
- b. Untuk penelitian selanjutnya *tax avoidance* dapat memilih model terbaik selain di dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina victoria subakti, Theresa. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaraan Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Tedaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Universitas Tri Sakti*.
- Agoes dan Trisnawati, Mardiah. 2007. Perbedaan Laba Akuntansi dan

- Laba Fiskal serta Pajak tangguhan Terhadap Persentasi Laba. *"Jurnal Akuntansi dan Ekonomi* Vol 12, No. 13 (132:15).
- Bambang. 2009. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Departemen Akuntansi, Depok.
- Budiman. 2012. *Detecting Earnings Management The Accounting Review* Vol 70, 193-225.
- Chen, K. P dan Chu, C. Y. C. 2010. *Internal Control vs External Manipulation: A Model of Corporate Income Tax Evasion*. *Rand Journal of Economics*.
- Desai, M. A. dan DD. Darmaphala. 2007. *Corporate Tax Avoidance and Firm Value*. *Journal of Financial Economics*.
- Djamaludin, Sumarsan, S.E, MM. 2008. Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta Indeks.
- Dwitridinda, Putri. (2012). Pengaruh Struktur Kepemilikan strategi Diversifikasi, Leverage, Faktor Ekstern Terhadap Nilai Perusahaan. *Ekuitas Vol 11 no. 2 maret 2007*.
- Dyren. 2012. Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam Memprediksi Manajemen Laba. *Simposium Nasional Akuntansi VII. 2-3 Desember 2004*. Denpasar, Bali.
- Friese, A, S. Link, dan S. Mayer. 2006. *Taxation and Corporate Governance. Working Paper*.
- Gujarati, Damodar N. 2007. *Dasar-dasar Ekonometrika Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Hanlon, M. dan Heitzman, S. (2010) *A review of Tax Research*. *Journal of Accounting and Economics* 50, 127-128.
- Haruman, Tendi. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan: Survey pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XI. 23-24 juli 2008*, Pontianak.
- Heru, Rudy Gunarso, 1997, Peran Perencanaan Pajak untuk Menghasilkan Penghematan Pajak: Studi Kasus Industri Sepatu Pt. Isr, Thesis Magister Manajemen Bisnis dan Administrasi Teknologi. Bidang Khusus Bisnis Manufaktur, *Skripsi* Institut Teknologi Bandung.
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness* (www.ssrn.com)
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan edisi revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mayangsari, Sekar. 2003. Pengaruh Keahlian dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Sebuah kuasieksperimen. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol 6 No. 1 (Januari)*.
- Mills, L, and K. Newberry. 2001. *"The Influence of Tax and Non-Tax Cost*

- on *Book-Tax Reporting Differences: Public and Private Firms,*” *The Journal of American Accounting Association*, Vol hal 23, hal 1-19.
- Nuralifmida, Ayu Anissa. 2011. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Jakarta.
- Phillips, J. 2003. *Coorporate Tax-planing effectiveness: The Role of Compensation- based incentives*. *The Accounting Reviw* 78, 847-874.
- Pohan, H. T. 2008. Pengaruh *Good Coorporate Governance*, *Rasio Tobin’s q*, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. <http://hotmanpohan.blogspot.com>
- PSAK No. 46, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Purba, Marisi Andreas (2005), *Akuntansi Pajak Penghasilan Berdasarkan IAS No. 12 & PSAK No. 46, Edisi Pertama, cetakan Pertama*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suandy, Erly. (2011), *Hukum Pajak, Edisi 5*, Salemba empat, Jakarta..
- Sujoko. 2006. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Strategi Diversifikasi, *Leverage*, Faktor Ekstern terhadap Nilai Perusahaan. *Ekuitas Vol 11 No. 2 maret 2007*.
- Sumarsan, Thomas, SE, MM. (2010). *Perpajakan Indonesia: Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak*.
- Sopnar, Lombartoruan. *Akuntansi Pajak Edisi Revisi Pasiando*: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1996.
- Tarjo. 2008. “Pengaruh Kosentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost of Equity Capital”. Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wing, Wahyu Winarno. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Unit Penerbit dan Percetakan: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- [www:idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Xynas. (2011). *Effective Tax Rates and The “Industrial Policy” Hypotesis: evidence from Malaysia*. *Journal of International Accounting, Auditing, Auditing and Taxation*, 45-62.
- Zain, Muhamad. (2005). *Manajemen Perpajakan, Edisi 2*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

LAMPIRAN

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

| | |
|---|----------------------|
| Populasi | 137 Perusahaan |
| Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data lengkap atau tidak melaporkan laporan keuangan selama tahun penelitian | (14) Perusahaan |
| Perusahaan manufaktur yang laba bersih sebelum pajaknya mengalami kerugian selama tahun 2010-2012 | (38) Perusahaan |
| Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dengan kurs selain rupiah | (7) Perusahaan |
| Perusahaan manufaktur delisting | (15) Perusahaan |
| Perusahaan yang dapat menjadi sampel | 63 Perusahaan |

Tabel 2. Daftar Perusahaan Sampel

| No | Kode | Nama Perusahaan |
|----|------|--|
| 1 | ADES | Akhasa Wira Internasional Tbk |
| 2 | ADMG | Polichem Indonesia Tbk |
| 3 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk |
| 4 | ALMI | PT. Alumindo Light Metal Industry, Tbk |
| 5 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk |
| 6 | APLI | Asiaplast Industries Tbk |
| 7 | ARNA | Arwana citra mulia |
| 8 | ASII | Astra International Tbk |
| 9 | AUTO | Astra Otoparts Tbk |
| 10 | BATA | Sepatu Bata, Tbk |
| 11 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk |
| 12 | BUDI | Budi Acid Jaya Tbk |
| 13 | CEKA | Cahaya Kalbar Tbk |
| 14 | CPIN | PT. Chaoren Pokphand Indonesia, Tbk |
| 15 | DLTA | Delta Djakarta Tbk |
| 16 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk |
| 17 | EKAD | Ekadharma Internasional, Tbk |
| 18 | ETWA | PT. Eterindo Wahanatama, Tbk |
| 19 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel, Tbk |
| 20 | GGRM | Gudang Garam Tbk |
| 21 | GJTL | PT. Gajah Tunggal, Tbk |
| 22 | HMSP | HM Sampoerna Tbk |
| 23 | IGAR | Champion Pasifik Indonesia Tbk |
| 24 | IMAS | Indomobil Sukses International, Tbk |

| | | |
|----|------|--|
| 25 | INAI | Indal Aluminium Industri Tbk |
| 26 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
| 27 | INDS | Indospring Tbk |
| 28 | INTP | Indocement Tunggul Prakasa Tbk |
| 29 | JECC | Jembo Cable Company, Tbk |
| 30 | JPFA | PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk |
| 31 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk |
| 32 | KAEF | Kimia Farma Tbk |
| 33 | KBLI | KMI Wire and Cable Tbk |
| 34 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk |
| 35 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk |
| 36 | KICI | Kedawung Indah Tbk |
| 37 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |
| 38 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk |
| 39 | MAIN | PT. Malindo Feedmill, Tbk |
| 40 | MBTO | PT. Martina Berto, Tbk |
| 41 | MERK | Merck Tbk |
| 42 | MYOR | Mayora Indah Tbk |
| 43 | NIPS | Nipress Tbk |
| 44 | PICO | PT Pelangi Indah Canindo Tbk |
| 45 | PRAS | Prima Alloy Stell Tbk |
| 46 | PYFA | Pyridam Farma Tbk |
| 47 | ROTI | PT. Nippon Indosari Corporindo, Tbk |
| 48 | SCCO | Sucaco Tbk |
| 49 | SIPD | Sierad Produce Tbk |
| 50 | SKLT | Sekar Laut Tbk |
| 51 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk |
| 52 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk |
| 53 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk |
| 54 | SQBB | PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk |
| 55 | SRSN | Indo Acidatama Tbk |
| 56 | STTP | Siantar Top Tbk |
| 57 | TCID | Mandom Indonesia Tbk |
| 58 | TOTO | PT Surya toto Indonesia Tbk |
| 59 | TRST | PT Trias Sentosa Tbk |
| 60 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Tbk |
| 61 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk |
| 62 | VOKS | Voksel Electric Tbk |
| 63 | YPAS | Yana Prima Hasta Persada, Tbk |

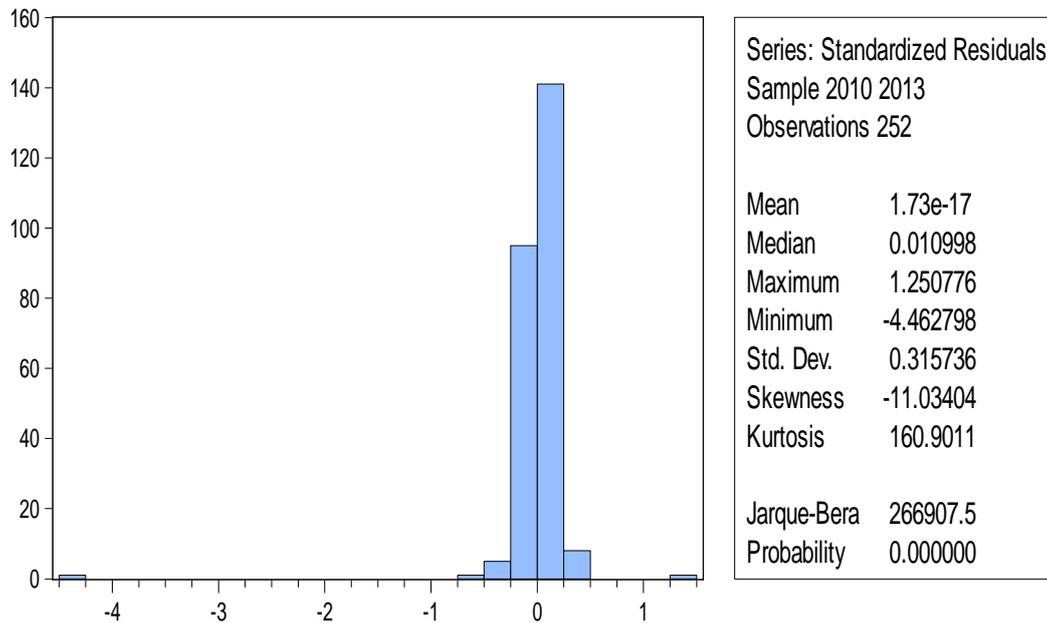
Tabel 3. Hasil Deskriptif Statistik

| | Mean | Maximum | Minimum |
|------|----------|----------|-----------|
| CETR | 0.235858 | 1.456803 | 4.330.460 |
| INST | 0.721190 | 1.000000 | 0.204000 |
| INDP | 0.396834 | 1.000000 | 0.000000 |
| DTE | 0.000168 | 0.051406 | -0.093150 |

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Data Panel Model 1

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | 0.325886 | 0.095880 | 3.398906 | 0.0008 |
| INST | -0.150786 | 0.106997 | -1.409254 | 0.1600 |
| INDP | 0.049194 | 0.132273 | 0.371911 | 0.7103 |
| DTE | -4.794952 | 2.038844 | -2.351799 | 0.0195 |
| R-squared | 0.030123 | Mean dependent var | 0.235858 | |
| Adjusted R-squared | 0.018391 | S.D. dependent var | 0.320602 | |
| S.E. of regression | 0.317640 | Akaike info criterion | 0.559949 | |
| Sum squared resid | 25.02198 | Schwarz criterion | 0.615971 | |
| Log likelihood | -66.55354 | Hannan-Quinn criter. | 0.582491 | |
| F-statistic | 2.667510 | Durbin-Watson stat | 2.315232 | |
| Prob(F-statistic) | 0.045030 | | | |

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas



Tabel 9. Hasil Uji Heterokedastisitas

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 0.325886 | 0.049352 | 6.603356 | 0.0000 |
| INST | -0.150786 | 0.082921 | -1.818437 | 0.0702 |
| INDP | 0.049194 | 0.052100 | 0.944214 | 0.3460 |
| DTE | -4.794952 | 3.169621 | -1.512784 | 0.1316 |

Tabel 10. Hasil Uji Multikolonieritas

| | INST | INDP | DTE |
|------|-----------|-----------|-----------|
| INST | 1.000000 | -0.010247 | 0.005201 |
| INDP | -0.010247 | 1.000000 | -0.000918 |
| DTE | 0.005201 | -0.000918 | 1.000000 |

